

# PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2023 dapat terselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023, yang mana telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terdapat 4 indikator kinerja yang harus dicapai di akhir tahun 2023.

Realisasi kinerja tahun 2023 sampai dengan triwulan IV, keempat indikator kinerja Dinas Perhubungan belum mencapai target seluruhnya. Namun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tetap akan berusaha dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan lagi capaian kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perhubungan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.



## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

---

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 akan bermanfaat bagi peningkatan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**



**AGUS SRIYONO, ATD., S.IP., MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19670801 199203 1 006



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sesuai dengan target yang telah menjadi komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasarkan target kinerja dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program serta beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan, dan strategi yang diambil Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 mencapai 88.76 % termasuk kategori tinggi. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas 2023. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan :

- a. 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama tercapai 75 % dengan kategori “Sangat Tinggi”;
- b. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama tercapai 25% dengan kategori “Tinggi”;

Dari 4 (empat) indikator kinerja utama, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama belum berhasil mencapai target yaitu : Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota, dikarenakan dalam perhitungan ini terdapat perubahan komposisi perhitungan bobot lintas trayek disesuaikan dengan Permendagri No 18 Tahun 2020, bobot lintas trayek angkutan jalan adalah 0,7 dan untuk bobot lintas trayek angkutan sungai adalah 0,3

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan 2 (dua) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan presentase penyerapan anggaran kurang dari 100%. Dimana capaian anggaran Dinas



Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 mencapai 96.04 %, yakni dengan pagu anggaran Rp. 32.535.139.901 terealisasi sebesar Rp. 31.245.952.875

Adapun hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 mendapat predikat “A” dengan nilai 88,15. Selanjutnya rekomendasi yang disampaikan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2023, sampai dengan saat ini masih terus ditindaklanjuti. Selain itu pada tahun 2023 juga telah direncanakan tindak lanjut perbaikan.

Akhirnya, semoga LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan ***Banyumas yang Maju, Adil dan Mandiri.***



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	2
C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan	3
D. Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	5
E. Sumber Daya Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	7
F. Isu Strategis	7
G. Landasan Hukum	10
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis	12
1. Rencana Strategis	12
2. Indikator Kinerja Utama 2023	15
3. Perjanjian Kinerja 2023	16
B. Perencanaan Anggaran	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	39
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	39
B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS	40



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan tingkat pendidikan-----	5
Tabel 1.2 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan Jenis Kelamin -----	5
Tabel 1.3 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan tingkat Eselon -----	6
Tabel 1.4 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas Tahun berdasarkan Golongan/Ruang -----	6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 -----	14
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas -----	15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 -----	17
Tabel 2.4 Rencana Anggaran Dinas Perhubungan berdasarkan Sasaran Strategis -- -----	17
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - -----	20
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-----	21
Tabel 3.3 Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023-----	22
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas-- -----	23
Tabel 3.5 Penilaian Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas -----	24
Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Tujuan: “Meningkatnya Konektivitas Wilayah”-----	25
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 1: “Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai” -----	25
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2: “Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan” -----	29



Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 3: “Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota”-----	30
Tabel 3.10 Faktor Penghambat dan Pendorong Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas-----	30
Tabel 3.11 Penyelerasan hasil kinerja Dinas Perhubungan dengan capaian Nasional Tahun 2023-----	34
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 -----	35
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Per Sasaran Tahun 2023 -----	35
Tabel 3.14 Tingkat Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran-----	36
Tabel 3.15 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Di Dinas Perhubungan ---	36



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden



No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas**

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang berlokasi di Jalan Margantara Tanjung Nomor 460 Kecamatan Purwokerto Barat adalah OPD di Kabupaten Banyumas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari Sekretariat, 4 (empat) bidang, 8 (delapan) seksi dan 2 (dua) UPTD. Bidang-bidang dan seksi-seksi yang ada meliputi:

#### **A. Bidang**

1. Bidang Lalu Lintas
  - 1.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas
  - 1.2 Seksi Rekayasa Lalu Lintas
2. Bidang Angkutan dan Keselamatan
  - 2.1 Seksi Angkutan
  - 2.2 Seksi Keselamatan
3. Bidang Prasarana
  - 3.1 Seksi Prasarana
  - 3.2 Seksi Terminal
4. Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran
  - 4.1 Seksi Pengendalian Operasional
  - 4.2 Seksi Perparkiran

#### **B. UPTD**

1. UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor)
2. UPTD PSPP (Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan)



**C. Kewenangan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



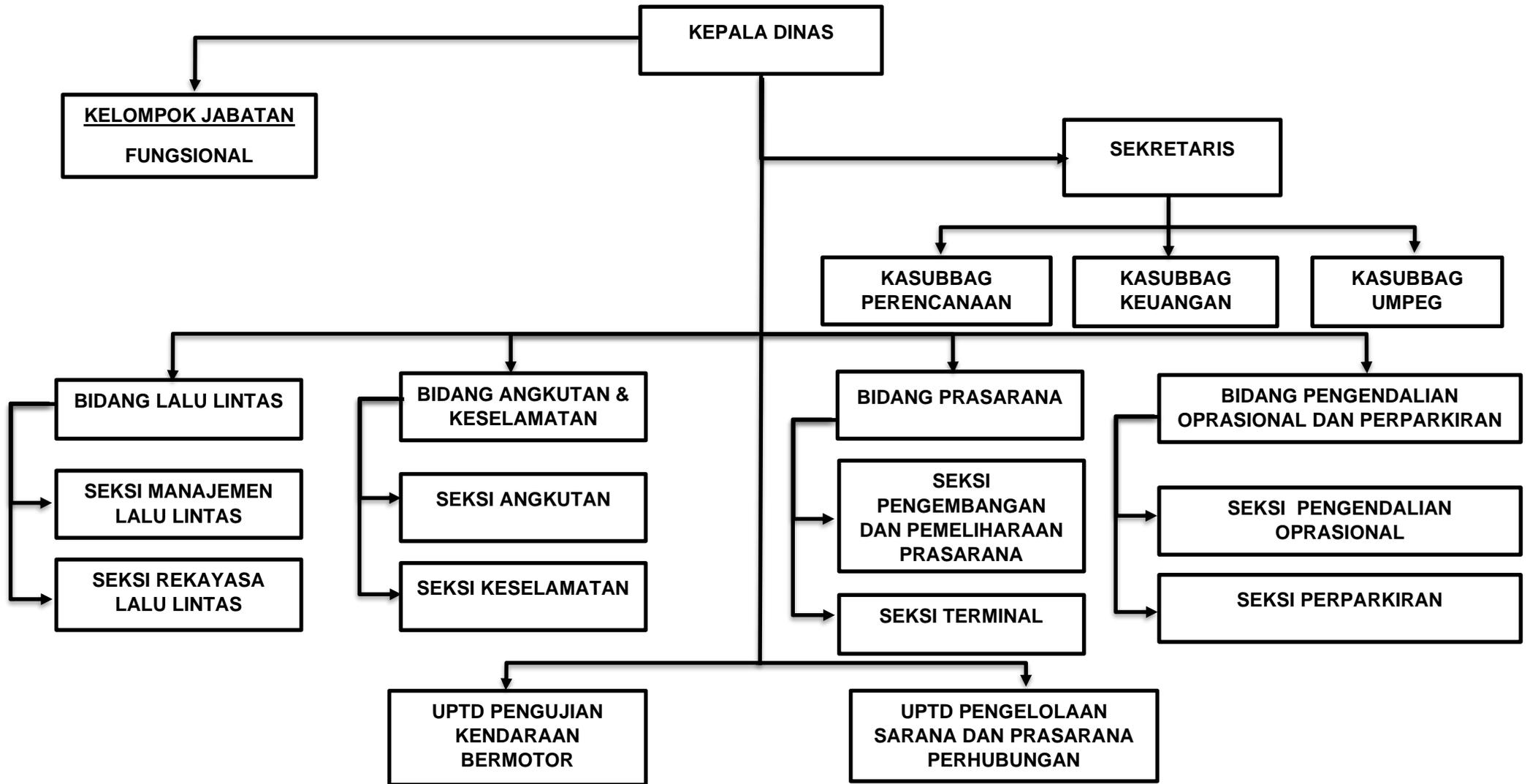
## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

---

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas





**D. Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas didukung oleh sejumlah pegawai yang tertanggal 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 223 pegawai dengan rincian seperti tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas**  
**berdasarkan tingkat pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah PTT	Jumlah PHL	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	5	0	0	5
2.	Sarjana (S1)	13	0	17	30
3.	Diploma (D4)	2	0	8	10
4.	Sarjana Muda (D3)	16	0	6	22
5.	Diploma (D2)	6	0	5	11
6.	SLTA	23	0	106	129
7.	SLTP	9	0	2	11
8.	SD	3	1	1	5
	<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>145</b>	<b>223</b>

**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas**  
**berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah PNS	Jumlah PTT	Jumlah PHL	Jumlah
1.	Laki-laki	61	1	123	185
2.	Perempuan	16	0	22	38
	<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>145</b>	<b>223</b>



Tabel 1.3

Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas  
berdasarkan tingkat Eselon

No.	Tingkat Eselon	Jumlah (Orang)
1.	II. A	0
2.	II. B	1
3.	III. A	1
4.	III. B	4
5.	IV. A	11
6.	IV. B	2
	Total	18

Tabel 1.4

Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas Tahun  
berdasarkan Golongan/Ruang

Gol/Ruang PNS	Jumlah (Orang)
IV/d	0
IV/c	
IV/b	1
IV/a	4
III/d	9
III/c	4
III/b	8
III/a	3
II/d	17
II/c	15
II/b	9
II/a	-
I/d	7
I/c	0
I/b	0
I/a	0
Total	77



### E. Sumber Daya Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Sumber daya keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>4.065.000.000</b>	<b>4.108.000.000</b>
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>20.357.267.809</b>	<b>32.535.139.901</b>
2.1	Belanja Operasi	18.388.180.809	28.133.011.401
2.2	Belanja Modal	1.969.087.000	4.402.128.500

### F. Isu Strategis

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan, yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan untuk 5 tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji dalam wilayah Kabupaten Banyumas perlu diimbangi dengan penambahan atau peremajaan alat uji yang ada dan perbaikan fasilitas pendukung untuk para pengguna layanan pengujian dalam rangka memperlancar serta meningkatkan kualitas pelayanan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. Adapun beberapa catatan tim akreditasi dari Kementerian Perhubungan pada saat melaksanakan penilaian akreditasi UPTD PKB di Banyumas,yaitu:
  - a. UPTD PKB Dinas Perhubungan Kab.Banyumas belum memiliki akses keluar masuk kendaraan yang memadai (tidak memiliki pintu gerbang keluar dan masuk, akses jalan keluar belum 100% di cor/diaspal)



- b. Tembok pagar dinding keliling belum 100% terbangun, padahal didalam area UPTD PKB terdapat 2 gedung yang memiliki nilai aset milyaran rupiah.

Berdasarkan catatan tersebut, maka diperlukan upaya nyata untuk segera melengkapi kekurangan tersebut

2. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang pada persimpangan yang diatur dengan alat pengatur isyarat lalu lintas (APILL) pada wilayah perkotaan Purwokerto telah dikembangkan sistem pengaturan yang semula dengan manual dengan menggunakan Program ATCS (*Area Traffic Control System*) di beberapa titik simpang. Penambahan program ATCS perlu dilakukan pada APILL di beberapa simpang supaya kontrol traffic dapat dilakukan dengan lebih maksimal.
3. Wilayah Kabupaten Banyumas sebagai jalur lintasan mobilitas antar provinsi untuk angkutan barang dan orang, dengan memperhatikan jarak pada posisi titik lelah pengemudi harus istirahat, maka perlu dibangunnya rest area pada jalan Provinsi/Nasional di Kabupaten Banyumas.
4. Dengan semakin meningkatnya penggunaan mobil pribadi, dikarenakan semakin menurunnya tingkat pelayanan angkutan umum yang cenderung mahal dan kurang memenuhi standar keselamatan yang memadai, perlu mendorong masyarakat untuk menggunakan *bus rapid transit* yang telah ada. Dalam upaya mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum tersebut, perlu dilakukan pengembangan sarana prasarana seperti penambahan halte bagi para calon penumpang *bus rapid transit* supaya para calon penumpang merasa aman, nyaman dalam menunggu BRT.
5. Pengembangan industri di kecamatan Ajibarang dengan dibangunnya pabrik semen, maka untuk mengurangi beban kerusakan jalan, perlu pengangkutan barang dengan menggunakan angkutan kereta api. Sehingga diperlukan terminal angkutan barang/*dry port* di wilayah Kabupaten Banyumas.
6. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, maka untuk menarik masyarakat meningkatkan pemahaman keselamatan di jalan telah dibuat Taman Edukasi Keselamatan Transportasi Darat akan tetapi masih diperlukan adanya tambahan fasilitas seperti gedung yang berfungsi untuk sosialisasi tentang keselamatan di jalan.



7. Meningkatnya pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam wilayah perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas parkir kendaraan, berdampak penggunaan badan jalan sebagai area parkir. Sehingga penyediaan fasilitas gedung atau taman khusus parkir menjadi kebutuhan dalam mobilitas pergerakan orang dan barang serta tidak adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan gembok/mobil derek sehingga menyulitkan operasi penindakan terhadap para pelanggar parkir.
8. Meningkatkan mobilitas orang pada simpul transportasi jalan, maka untuk melayani kebutuhan angkutan kota/pedesaan pada simpul terminal telah dibangun Terminal tipe C pada simpul yang memenuhi persyaratan. Penambahan Terminal Tipe C perlu dibangun di daerah Sokaraja.
9. Pengoperasionalan terminal pada tahun 2023 menghadapi tantangan serius akibat banyaknya kios yang mengalami kerusakan serta fasilitas umum yang rusak, termasuk kamar mandi, ruang tunggu, atap plafon, dan drainase. Kerusakan kios berdampak langsung pada penurunan Pendapatan Daerah karena kios yang tidak dapat disewakan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh pada kios yang rusak guna memastikan ketersediaan dan fungsionalitasnya
10. Adanya ketentuan usia teknis kendaraan untuk Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan berdasarkan Perda No. 1 tahun 2015, seiring dengan Permen No. 98 Tahun 2019 yang menetapkan usia teknis Angkutan Kota selama 20 tahun dan Angkutan Pedesaan selama 15 tahun. Kondisi ini mengakibatkan beberapa kendaraan tidak dapat melaksanakan izin trayeknya karena telah melewati batas usia yang diatur, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
11. Diperlukan kajian teknis terkait jumlah kendaraan di suatu kawasan untuk menentukan kuota layanan, mengingat belum adanya pengaturan terkait berapa kendaraan yang akan melayani dalam satu kawasan. Hal ini menjadi krusial agar para penumpang dapat terlayani dengan baik dan sampai ke kawasan tujuan mereka.



## A. Landasan Hukum

LKjIP Kabupaten Banyumas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023

## B. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah :

### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Dinas



## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

---

Perhubungan Kabupaten Banyumas, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematis.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis dan Perencanaan Anggaran

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, Akuntabilitas Keuangan, dan Prestasi Dinas Perhubungan.

### BAB IV PENUTUP



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. Perencanaan Strategis

##### 1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dalam hal ini adalah Kabupaten Banyumas. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1). Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Banyumas terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan *stakeholder*.

Pada tahun 2023, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengalami perubahan sejalan dengan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas, yang kemudian dilakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mencakup penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **a. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan daerah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Banyumas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju



Kabupaten Banyumas yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Visi Bupati Banyumas Tahun 2013-2018 adalah:

**“MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL-MAKMUR DAN MANDIRI”**

### **b. Misi**

Untuk mewujudkan Misi tersebut, Pimpinan Daerah meletakkan misi-misi yang mendukung visi. Terdapat 8 Misi untuk tahun 2018-2023 atau yang biasa disebut Hasta Krida :

- 1) Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
- 5) Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.
- 8) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.



Setiap OPD nantinya akan mengarah pada pencapaian unsur misi RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengarah pada pencapaian unsur misi ke-6 pada RPJMD yaitu : **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.**

### c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati Banyumas serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:



Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Konektivitas Wilayah		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	$(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan Sungai, danau dan penyeberangan})$		NA	NA	NA	NA	0.6865	0.8275	0.89	0.89
	1. Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	$(\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/kota tsb} \times \text{bobot lintas}) \div (\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut})$		NA	NA	NA	NA	0.125	0.375	0.5	0.5
	2. Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan	Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	$(\text{Jumlah trayek yg dilayani pada Kabupaten/Kota} \times \text{bobot trayek}) \div (\text{jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut})$		NA	NA	NA	NA	0.78	0.8	0.8	0.8
	3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		NA	NA	NA	NA	0.74	0.74	0.74	0.74



## 2. Indikator Kinerja Utama 2023

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Perda Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Formulasi : (IK1 x bobot lintas trayek angkutan jalan) + (IK2 x Bobot lintas trayek angkutan Sungai,danau dan penyebrangan)  Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  Sumber data : Bidang Angkutan dan Keselamatan dan UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan



NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
2	Meningkatnya Konektivitas angkutan jalan	Indeks Konektivitas angkutan jalan	Formulasi : Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut Tipe perhitungan : Non Kumulatif  Sumber Data : Lakip Dinas Perhubungan, Bidang Angkutan dan Keselamatan
3	Meningkatnya Konektivitas angkutan sungai	Indeks konektivitas angkutan sungai	Formulasi : jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tersebut x bobot lintas dibagi jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada kabupaten/kota tersebut  Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  Sumber Data : Lakip Dinas Perhubungan, UPTD PSPP
4	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Formulasi : <i>Volume/Capacity</i> Ratio di Jalan Kabupaten/Kota  Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  Sumber Data : Lakip Dinas Perhubungan, Bidang Lalu Lintas

### 3. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang



tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0.89
2	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	0.5
3	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan	Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	0.8
4	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten Kota	0.74

## B. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp 28.133.011.401 dan Belanja Modal sebesar Rp 4.402.128.500 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Anggaran Dinas Perhubungan berdasarkan Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rp 32.535.139.901
2.	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai	Rp 297.742.200



## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

---

No.	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran
3.	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan	Rp 16.515.197.701
4.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Rp 15.722.200.000



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas, serta mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara



Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Realisasi capaian kinerja akan dilakukan penilaian dan pemeringkatan kinerja dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 seperti tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	SangatRendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023, yang mana telah



ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut:

- Tujuan terdiri dari 1(satu) indikator;
- Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) indikator;
- Sasaran 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) indikator;
- Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indikator.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 024/12272/2021.

Hasil pengukuran atas indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		0.89	0.79	88.76%	Tinggi
2	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai		0.5	0.75	150 %	Sangat Tinggi



## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
3	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan	Indeks Konektivitas Angkutan Jalan		0.8	0.8	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		0.74	0.60	118.92%	Sangat Tinggi

Berdasarkan data pada Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, keempat indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah berhasil melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2018–2023, yang mana sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 terdapat 4 (empat) sasaran strategis dengan total indikator sebanyak 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023**

No.	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1
2	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai	1
3	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan	1
4.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	1



## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Akhir Renstra )**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	-	0.6865	0.7025	84.89	0.89	0.79	88.76%
2	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	-	0.375	0.125	33.33	0.5	0.75	150%
3	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan	Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	-	0.8	0.8	100	0.8	0.8	100%
4	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	-	0.74	0.74	100	0.74	0.60	118.92%



**Tabel 3.5**  
**Evaluasi / Penilaian Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas**

Predikat	Rata-Rata Capaian (%)	Jumlah Indikator
<b>Sangat Tinggi</b>	123	3
<b>Tinggi</b>	88.76	1
<b>Sedang</b>	-	
<b>Rendah</b>	-	
<b>Sangat Rendah</b>	-	

Evaluasi atau penilaian capaian Indikator ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana realisasi, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam mencapai misi, sehingga dapat dievaluasi dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam proses evaluasi kinerja juga dilakukan analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, penting juga untuk menggunakan pembandingan dengan standar atau target yang telah ditetapkan. antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada 4 (empat) item indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

<b>Tujuan</b>
<b>Meningkatnya Konektivitas Wilayah</b>



Pencapaian tujuan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**

**Analisis Pencapaian Tujuan: “Meningkatnya Konektivitas Wilayah”**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Indikator I)	-	0.8275	0.7025	84.89	0.89	0.79	88.76

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan adalah : **“Meningkatnya Konektivitas Wilayah”** yang dapat diukur dengan 1 indikator yaitu : Capaian Realisasi kinerja dari indikator I adalah " Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota " sebesar 0.79 dari target sebesar 0.89 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 88.76%. Capaian ini menunjukkan Dinas Perhubungan Tahun 2023 belum berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Tahun 2023 adalah tahun terakhir dalam pelaksanaan renstra perubahan 2018-2023, capaian kinerja indikator I: "Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota" tahun 2023 adalah sebesar 88.76 % dari target tahunan 2023. Selanjutnya apabila capaian kinerja tahun 2023 (yaitu sebesar 0.79) dibandingkan dengan target akhir renstra (yaitu sebesar 0.89), maka capaian kinerja pada indikator I tahun 2023 adalah 88.76% dari target akhir renstra. Adapun program yang mendukung untuk indicator I ini adalah Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program Pengelolaan Pelayaran.

<b>Sasaran 1</b>
<b>Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai</b>

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**

**Analisis Pencapaian Sasaran 1: “Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai”**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai (indikator II)	-	0.375	0.125	33,33	0.5	0.75	150



Sasaran selanjutnya adalah “Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai” yang dapat dilihat capaiannya dari 1 indikator yaitu : Capaian realisasi kinerja pada indikator II: "Indeks Konektivitas Angkutan Sungai " mencapai 0.75. hal ini melebihi target yang telah ditetapkan 0.5, sebagaimana tercatum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dengan presentasi capaian kinerja pada Indikator II mencapai 150%, sehingga dapat disimpulkan Dinas Perhubungan Tahun 2023 telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dikarenakan pada Kabupaten Banyumas terjadi lonjakan pada pertengahan tahun terkait bobot lintas trayek angkutan sungai dari 0,5 menjadi 1.

Tahun 2023 adalah tahun ketiga pelaksanaan renstra perubahan 2018-2023, capaian kinerja indikator II: " Indeks Konektivitas Angkutan Sungai" tahun 2023 adalah sebesar 150 % dari target tahunan 2023. Selanjutnya apabila capaian kinerja tahun 2023 (yaitu sebesar 0.75) dibandingkan dengan target akhir renstra (yaitu sebesar 0.5), maka capaian kinerja pada indikator II tahun 2023 adalah 150 % dari target akhir renstra. Adapun program yang mendukung untuk indikator II ini adalah Program Pengelolaan Pelayaran.

Dalam upaya mencapai indikator kinerja ini, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain terkait pelaksanaan angkutan sungai di Kabupaten, dimana hanya terdapat dua halte sungai, yakni Halte Sungai Papringan dan Halte Sungai Tambaknegara. Selain itu, permasalahan lainnya adalah belum terpasangnya rambu-rambu sungai yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sistem angkutan sungai.

Pembangunan infrastruktur Pelabuhan Sungai serayu sebagai penunjang sangat diharapkan supaya bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar serta diharapkan dengan pembangunan infrastruktur pembangunan dapat lebih merata.

Penyusunan Kajian Survey Investigasi dan Design (SID) Pengembangan Prasarana di Sungai Serayu Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mempersiapkan pembangunan pelabuhan SDP (Sungai, Danau, dan Penyeberangan) yang terukur dan terarah dengan menciptakan pelayanan transportasi SDP yang handal, memenuhi syarat kelancaran operasional, serta menjaga keselamatan pelayaran. Dalam perencanaan transportasi sungai, studi detail dan berkelanjutan terhadap aspek sistem sungai menjadi esensial. Analisis kelayakan, perencanaan fasilitas pelabuhan, dan desain serta perhitungan



konstruksi menjadi bagian penting dalam upaya ini, memastikan bahwa perencanaan yang dibuat sesuai sasaran.

Dengan mengumpulkan parameter-parameter data yang diperoleh di lapangan, kajian ini merumuskan rekomendasi untuk pengembangan prasarana di Sungai Serayu. Hasil dari "Survey Investigasi dan Desain (SID) Pengembangan Prasarana di Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah" nantinya akan menentukan rencana skala prioritas untuk lokasi pengembangan sarana pelabuhan SDP, memastikan pengembangan infrastruktur yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Penyusunan dokumen interim Kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) Pengembangan Prasarana di Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk:

1. memperoleh kondisi eksisting sebagai dasar untuk Menyusun rencana yang akurat dan sesuai dengan keadaan lapangan.
2. Mendapat informasi secara mendetail mengenai kondisi hidrografi, topografi, struktur, dan jenis lapisan tanah, serta merumuskan desain teknis yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan beserta fasilitasnya
3. Mendapatkan informasi dokumen spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya yang dilengkapi dengan analisa harga satuan. Dokumen ini menjadi acuan penting dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, dengan mempertimbangkan aspek teknis, potensi ekonomi, finansial, operasional, dan lingkungan
4. Menyiapkan dokumen bagi pelaksanaan fisik kegiatan yang bersifat teknis dan terukur. Dokumen ini mencakup identifikasi titik lokasi pembangunan fasilitas pelabuhan, layout pelabuhan, hasil uji laboratorium penyelidikan tanah, arus, bathimetri, serta desain umum fasilitas pokok dan penunjang
5. Memperoleh gambaran kondisi operasional pelabuhan saat ini serta proyeksi kedepan terkait kegiatan transportasi di wilayah studi. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan pemerintahan dengan memastikan pelabuhan dapat beroperasi secara optimal sesuai kebutuhan dan perkembangan wilayah

Adapun Skema orientasi Pengembangan Halte Sungai di Kabupaten Banyumas ada 6 Lokasi yakni :

1. Halte Sungai Tambaknegara
2. Halte Sungai Tumiyang
3. Halte Sungai Sokawera Kidul
4. Halte Sungai Papringan



5. Halte Sungai Kaliori
6. Pelabuhan Kedunguter

Dari enam skema orientasi pengembangan halte sungai yang diajukan, hanya lima di antaranya yang telah disetujui dan memiliki Dokumen Engineering Design (DED) yang telah dibuat. Kelima halte sungai tersebut adalah: 1) Halte Sungai Tambaknegara, 2) Halte Sungai Tumiyang, 3) Halte Sungai Sokawera Kidul, 4) Halte Sungai Papringan, dan 5) Pelabuhan Kedunguter. Untuk Halte Sungai Kaliori, tidak dapat dilakukan secara teknis dengan pertimbangan bahwa pada musim kemarau, elevasi surut membuat alur sungai tidak mungkin dilayari. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa kebutuhan halte sungai di Kabupaten Banyumas hanya mencakup lima halte sungai.

Selanjutnya, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BWSSO) mengajukan kajian kembali, dimana teridentifikasi bahwa dua halte, yaitu Halte Sokawera Kidul dan Halte Tumiyang, tidak memenuhi syarat Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) Kabupaten Banyumas.

Pada Tahun 2023, Kabupaten Banyumas merencanakan akan membangun 3 Halte sungai yaitu Halte Sungai Papringan, Halte Sungai Tambaknegara dan Halte Sungai Kedunguter, dengan rincian laporan sebagai berikut :

- 1) Dalam perkembangannya yang terealisasi hanya ada 2 Halte Sungai yaitu Halte Sungai tambaknegara dan halte sungai papringan
- 2) Untuk Halte sungai Kedunguter, belum terealisasi dikarenakan anggaran APBN dari Kementerian Perhubungan belum bisa digunakan karena DED lama titik lokasinya tidak sesuai dengan rekomtek BBWSO (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak) sehingga terdapat perubahan titik lokasi. Pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah membuat DED yang baru sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, dengan haraon Tahun 2024 Halte Kedunguter segera dibangun.



**Sasaran 2**

Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**

**Analisis Pencapaian Sasaran 2: “Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan”**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Konektivitas Angkutan Jalan (Indikator III)	-	0.8	0.8	100	0.8	0.8	100

Sasaran 2: “Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan” dapat dilihat dari 1 indikator yaitu :

Capaian realisasi kinerja indikator III: "Indeks Konektivitas Angkutan Jalan" adalah sebesar 0.8 dari target sebesar 0.8 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga prosentase capaian kinerjanya Tahun 2023 adalah 100%. Capaian ini menunjukkan secara garis besar Dinas Perhubungan Tahun 2023 hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

Hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian indikator kinerja adalah pada pelaksanaan program BTS Load factor adalah Kabupaten Banyumas masih belum memiliki dokumen trayek untuk mengukur kinerja trayek karena anggaran APBD yang terbatas.

Tahun 2023 adalah tahun ketiga dalam pelaksanaan renstra perubahan 2018-2023, capaian kinerja pada indikator III: "Indeks Konektivitas Angkutan Jalan" Tahun 2023 adalah sebesar 0.8 dari target tahunan 2023. Selanjutnya, apabila capaian tahun 2023 (yaitu sebesar 0.8) dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan (yaitu sebesar 0.8), maka capaian kinerja tahun 2023 pada indikator III adalah 100% dari target akhir renstra perubahan 2018-2023. Adapun program yang mendukung untuk indikator III ini adalah Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ

**Sasaran 3**

Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota



Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3: “Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota”**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota (Indikator IV)	-	0.74	0.60	118.92	0.74	0.60	118.92

Sasaran 3: “Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota” dapat dilihat dari 1 indikator yaitu : Capaian realisasi kinerja indikator IV: "V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota" adalah sebesar 0.60 dari target sebesar 0.74 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga prosentase capaian kinerjanya Tahun 2023 adalah 118.92%. Capaian ini menunjukkan secara garis besar Dinas Perhubungan Tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan.

Tahun 2023 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan renstra perubahan 2018-2023, capaian kinerja pada indikator IV: "Indeks Konektivitas Angkutan Jalan" Tahun 2023 adalah sebesar 0.60 dari target tahunan 2023. Selanjutnya, apabila capaian tahun 2023 (yaitu sebesar 0.60) dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan (yaitu sebesar 0.74), maka capaian kinerja tahun 2023 pada indikator IV adalah 118.92% dari target akhir renstra perubahan 2018-2023. Adapun program yang mendukung untuk indikator IV ini adalah Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian Dinas Perhubungan dilakukan analisis keberhasilan ataupun kegagalan sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor Penghambat/Pendorong	Solusi
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Pada sisi terminal masih banyaknya kios yang mengalami kerusakan	Dalam menghadapi kendala fasilitas umum, telah



			serta fasilitas umum yang rusak, termasuk kamar mandi, ruang tunggu, atap plafon, dan drainase. Kerusakan kios berdampak langsung pada penurunan Pendapatan Daerah karena kios yang tidak dapat disewakan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh pada kios yang rusak guna memastikan ketersediaan dan fungsionalitasnya	dilakukan penyesuaian anggaran tahun 2023 dengan menetapkan alokasi dana untuk perbaikan drainase dan perbaikan jalan di area parkir. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna terminal serta mendukung operasional yang lancar.
2.	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Hambatan yang dihadapi, antara lain terkait pelaksanaan angkutan sungai di Kabupaten, dimana hanya terdapat dua halte sungai, yakni Halte Sungai Papringan dan Halte Sungai Tambaknegara. Selain itu, permasalahan lainnya adalah belum terpasangnya rambu-rambu sungai yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sistem angkutan sungai.	Melakukan Penyusunan Kajian Survey Investigasi dan Design (SID) Pengembangan Prasarana di Sungai Serayu Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Serta menjalin kerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari



## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

				APBN guna pembangunan Dermaga Kedunguter. Pada tahun 2023, Dokumen Rencana Teknis (DED) telah disusun, dan rencananya pembangunan Dermaga Kedunguter akan segera dilaksanakan.
3.	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan	Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian indikator kinerja adalah pada pelaksanaan program BTS Load factor adalah Kabupaten Banyumas masih belum memiliki dokumen trayek untuk mengukur kinerja trayek karena anggaran APBD yang terbatas.	Dinas Perhubungan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Kementerian Perhubungan dan PT. Banyumas Raya Transportasi, untuk menciptakan moda transportasi yang aman dan nyaman, yakni Bus Rapid Transit. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi program dan mencapai hasil yang optimal.
4.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Sarana dan prasarana penunjang kinerja lalu lintas, seperti marka,	melakukan prioritas penggunaan



## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

---

			rambu, dan penggantian traffic light yang terintegrasi dengan ATCS, masih belum memadai. Potensi hambatan muncul dalam bentuk biaya maintenance/perawatan ATCS yang tinggi, memerlukan alokasi anggaran yang signifikan.	anggaran untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang pada persimpangan yang diatur dengan alat pengatur isyarat lalu lintas. Selain itu dengan semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas maka Traffic light yg responsif dan terintegrasi juga sangat diperlukan agar tdk terjadi antrian yg panjang di simpang
--	--	--	--	--



**Tabel 3.11**  
**Penyelerasan hasil kinerja Dinas Perhubungan dengan capaian Nasional Tahun 2023**

No	Indikator Tujuan	Capaian 2023	Keterangan
1	<b>Nasional :</b> Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional <i>Sumber :</i> <a href="http://epformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian/iku/2023/001/001">http://epformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian/iku/2023/001/001</a>	0.76	Konektivitas Transportasi Darat: 0,946; Konektivitas Transportasi Laut: 0,94; Konektivitas Transportasi Udara: 0,78; Konektivitas Transportasi Perkeretaapian: 0,436; Konektivitas Transportasi Perkotaan : 0,636; Sehingga total Konektivitas (Nas) = $(0,946 \times 23,75\%) + (0,94 \times 23,75\%) + (0,78 \times 23,75\%) + (0,436 \times 23,75\%) + (0,636 \times 5\%) = 0,75$
2.	<b>Kabupaten :</b> Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0.785	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot penyeberangan})$ Diketahui : Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan. ( Bobot Angkutan SDP = 0,3 Bobot Angkutan Jalan = 0,7) Perhitungan : $( 0,8 \times 0,7 ) + ( 0,75 \times 0,3 ) = 0,785$

## B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 target pendapatan Retribusi di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp 4.108.000.000. Selanjutnya pada akhir tahun 2023 Dinas Perhubungan berhasil mencapai realisasi pendapatan retribusi



## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

sebesar Rp 4.146.117.600 (sebesar 100.92% dari target). Hal ini menunjukkan Dinas Perhubungan telah terpenuhinya target retribusi yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp 28.133.011.401,00 Sedangkan untuk anggaran Belanja Modal Tahun 2023 Dinas Perhubungan sebesar Rp 4.402.128.500,00 dengan jumlah keseluruhan Rp 32.535.139.901,00 dan pada akhir tahun anggaran 2023 capaian realisasi sebesar Rp 31.245.952.875 atau sebesar 96.03

**Tabel 3.12**

### Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
Belanja Modal	Rp 4.402.128.500	Rp 4.378.675.153	Rp 23.453.347
Belanja Operasi	Rp 28.133.011.401	Rp 26.867.277.722	Rp 1.265.733.679
Jumlah	Rp 32.535.139.901	Rp 31.245.952.875	Rp 1.289.187.026

Untuk realisasi anggaran per sasaran kegiatan akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.13**

### Realisasi Anggaran

#### Dinas Perhubungan Per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Prosentase Realisasi Anggaran
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rp 32.535.139.901	Rp 31.245.952.875	96.04 %
2.	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai	Rp 297.742.200	Rp 295.319.145	99.19 %
3.	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan	Rp 16.515.197.701	Rp 15.889.591.853	95.21 %
4.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Rp 15.722.200.000	Rp 15.061.041.877	95.79 %



Untuk tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran akan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.14

Tingkat Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1	88.76	Rp 31.245.952.875	96.04 %
2.	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai	1	150	Rp 295.319.145	99.19 %
3.	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan	1	100	Rp 15.889.591.853	95.21 %
4.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	1	118.92	Rp 15.061.041.877	95.79 %

Untuk tingkat efisiensi anggaran terhadap penggunaan sumber daya akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.15

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1	88.76	96.04 %	-
2.	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai	1	150	99.19 %	50.81
3.	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Jalan	1	100	95.21 %	4.79
4.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	1	118.92	95.79 %	23.13

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan



Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 109 Paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp 14.919.518.714, realisasi kontrak sebesar Rp 14.607.482.145 , sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 312.036.569 , atau 2.09 %

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-catalog* dilaksanakan dengan metode *e-purchasing* dan pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melaksanakan sebanyak 23 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 8.577.504.500 , realisasi pengadaan sebesar Rp 8.179.905.895, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 397.598.605, atau 4,64 %.

### C. Prestasi Dinas Perhubungan

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas cukup memberikan berbagai prestasi yang membanggakan, yakni sebagai berikut :

#### 1. PERINGKAT III UPG TERBAIK TAHUN 2023

Pada tanggal 15 November 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten sebagai Peringkat III dengan kategori UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) Terbaik Tahun 2023.



#### 2. TOP 3 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

Pada tanggal 12 Desember 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten sebagai Top 3 Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik



Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2023 atas Inovasi SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor)





## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian kinerja rata-rata sasaran	Predikat
1	Tujuan OPD:	1	88.76 %	Tinggi
2	Sasaran 1:	1	150 %	Sangat Tinggi
3	Sasaran 2:	1	100 %	Sangat tinggi
4.	Sasaran 3 :	1	118.92 %	Sangat Tinggi

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 indikator kinerja tersebut, secara umum Dinas Perhubungan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan predikat sangat tinggi 3 indikator dan sedang 1 indikator.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 32.535.139.901 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 31.245.952.875 dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 terdapat Silpa sebesar Rp 1.289.187.026

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 telah menggunakan anggaran sebesar Rp 31.245.952.875 dan telah mewujudkan capaian kinerja dengan peringkat “Tinggi” sesuai Skala pemeringkatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan kinerja Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sudah bagus dan perlu dipertahankan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah 96.04 % dari total anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan dapat menghemat anggaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banyumas.

## **B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dalam perjalanan mencapai target empat indikator, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menghadapi beberapa hambatan. Namun, berkat upaya mencari solusi, Dinas Perhubungan tetap berhasil mencapai target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Penyelesaian terhadap isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana penunjang kinerja lalu lintas, seperti marka, rambu, dan penggantian traffic light yang terintegrasi dengan ATCS, masih belum memadai. Potensi hambatan muncul dalam bentuk biaya maintenance/perawatan ATCS yang tinggi, memerlukan alokasi anggaran yang signifikan. Oleh karena itu, kami melakukan prioritas penggunaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang pada persimpangan yang diatur dengan alat pengatur isyarat lalu lintas. Selain itu dengan semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas maka Traffic light yg responsif dan terintegrasi juga sangat diperlukan agar tdk terjadi antrian yg panjang di simpang
2. Dalam upaya mencapai indikator kinerja terkait pelaksanaan program BTS Load factor, Kabupaten Banyumas menghadapi kendala karena keterbatasan anggaran APBD untuk dokumen trayek yang diperlukan dalam pengukuran kinerja trayek. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Kementerian Perhubungan dan PT. Banyumas Raya Transportasi, untuk menciptakan moda transportasi yang aman dan nyaman, yakni Bus Rapid Transit.



Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi program dan mencapai hasil yang optimal.

3. Dalam upaya mencapai indikator kinerja terkait konektivitas angkutan sungai, Kabupaten Banyumas menghadapi situasi di mana pada tahun 2023 hanya terdapat dua halte sungai, yaitu Halte Sungai Desa Papringan dan Halte Sungai Desa Tambaknegara. Meskipun demikian, pelaksanaan di kedua halte tersebut menemui beberapa kendala, terutama terkait ketidakterediaan rambu-rambu sungai. Kami terus menjalin kerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari APBN guna pembangunan Dermaga Kedunguter. Pada tahun 2023, Dokumen Rencana Teknis (DED) telah disusun, dan rencananya pembangunan Dermaga Kedunguter akan segera dilaksanakan.
4. Terkait dengan kegiatan pengoperasional terminal
  - a. Di Kabupaten Banyumas, saat ini ada 5 terminal yang sudah beroperasi yaitu 1) Terminal bulupitu 2) Terminal ajibarang 3) Terminal wangon 4) Terminal karanglewas an 5) Terminal Baturraden.
  - b. Pengoperasionalan terminal pada tahun 2023 menghadapi tantangan serius akibat banyaknya kios yang mengalami kerusakan serta fasilitas umum yang rusak, termasuk kamar mandi, ruang tunggu, atap plafon, dan drainase. Kerusakan kios berdampak langsung pada penurunan Pendapatan Daerah karena kios yang tidak dapat disewakan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh pada kios yang rusak guna memastikan ketersediaan dan fungsionalitasnya
  - c. Selain itu, dalam menghadapi kendala fasilitas umum, telah dilakukan penyesuaian anggaran tahun 2023 dengan menetapkan alokasi dana untuk perbaikan drainase dan perbaikan jalan di area parkir. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna terminal serta mendukung operasional yang lancar. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan fasilitas umum yang berkualitas akan meningkatkan citra dan pelayanan terminal, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang optimal bagi daerah.
  - d. Pada tahun 2023, proyek pembangunan Terminal Sokaraja telah dimulai.
5. Terkait dengan kegiatan angkutan
  - a. Adanya ketentuan usia teknis kendaraan untuk Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan berdasarkan Perda No. 1 tahun 2015, seiring dengan Permen No. 98 Tahun 2019 yang menetapkan usia teknis Angkutan Kota selama 20 tahun dan Angkutan Pedesaan selama 15 tahun. Kondisi ini mengakibatkan



## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

---

beberapa kendaraan tidak dapat melaksanakan izin trayeknya karena telah melewati batas usia yang diatur, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- b. Diperlukan kajian teknis terkait jumlah kendaraan di suatu kawasan untuk menentukan kuota layanan, mengingat belum adanya pengaturan terkait berapa kendaraan yang akan melayani dalam satu kawasan. Hal ini menjadi krusial agar para penumpang dapat terlayani dengan baik dan sampai ke kawasan tujuan mereka.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selama Tahun 2023. Semoga Dinas Perhubungan dapat selalu meningkatkan kinerja organisasi guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**



**AGUS SRIYONO, ATD., S.IP., MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19670801 199203 1 006